

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kepariwisataan saat ini menjadi sektor yang strategis sebagai bentuk upaya untuk pembangunan nasional, berdasarkan pada hal tersebut maka penyusunan rencana strategis merupakan bagian penting proses mengembangkan sektor wisata sesuai dengan segala potensi dan kekayaan alam yang ada di Negara. Negara Indonesia dijuluki Negara kepulauan karena memiliki kekayaan berupa keanekaragaman yang menjadikannya memiliki sangat banyak destinasi wisata baik yang sudah tereksplor maupun yang belum tereksplor. Kekayaan destinasi wisata di Indonesia dikembangkan tidak hanya untuk memberikan daya tarik kepada wisatawan lokal/dalam negeri, tetapi juga wisatawan dari luar negeri. Pada dasarnya pariwisata disebut sebagai bentuk aktivitas yang dilakukan oleh satu orang ataupun lebih dengan cara berkunjung ke suatu tempat yang memiliki nilai estetika serta didukung dengan berbagai fasilitas untuk tujuan rekreasi dan menambah wawasan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Bermacam-macam budaya yang dimiliki Negara Indonesia membentuk heterogenitas kearifan lokal yang dimiliki masing-masing daerah, kearifan lokal ini juga menjadi salah satu keunikan Negara Indonesia yang memberikan ketertarikan bagi wisatawan sekaligus kebanggaan untuk masyarakat Negara Indonesia. Keanekaragaman menumbuhkan rasa toleransi atas perbedaan yang ada karena hal ini justru menjadi nilai tambah bagi

wisatawan manca negara untuk datang dan merasakan sendiri keanekaragaman Indonesia. Setiap wilayah dalam Negara Indonesia mempunyai karakteristik kondisi geografi yang tidak sama sehingga menyebabkan adanya perbedaan potensi wisata, terdapat beberapa daerah yang memiliki potensi wisata berupa dataran tinggi atau pegunungan dan beberapa daerah yang memiliki potensi berupa pantai.

Pulau Jawa merupakan pulau paling padat dibandingkan pulau lain di Indonesia, selain padat penduduk, Pulau Jawa juga kaya akan destinasi wisata yang sudah berkembang dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Jawa Tengah adalah suatu provinsi yang terletak di Pulau Jawa dengan berbagai macam destinasi wisata yang dimiliki. Jawa Tengah merupakan wilayah di pulau Jawa yang memiliki jumlah wilayah sebanyak 29 kabupaten dan Kota berjumlah 6 wilayah, yang masing-masing memiliki karakteristik geografi berbeda sehingga memicu potensi wisata yang berbeda pula. Perkembangan pariwisata di Jawa Tengah dikategorikan baik, berikut ini disajikan jumlah pengunjung tempat wisata secara keseluruhan di Provinsi Jawa Tengah yang dihitung mulai tahun 2011 hingga 2018 :

Tabel 1.1  
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Provinsi Jawa Tengah, 2011-2018

Tahun	Wisatawan/Visitors		Jumlah Wisatawan
	M mancanegara/ International	Domestik/ Domestic	
2011	392.895	21.838.351	22.231.246
2012	372.463	25.240.021	25.612.484
2013	388.143	29.430.609	29.818.752
2014	419.584	29.852.095	30.271.679
2015	375.166	31.432.080	31.807.246
2016	578.924	36.899.776	37.478.700
2017	781.107	40.118.470	40.899.577
2018	677.168	48.943.607	49.620.775

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2018

Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat disimpulkan jika banyaknya wisatawan yang berasal dari mancanegara ataupun yang berasal dari domestik terjadi peningkatan setiap tahun meskipun jumlah total wisatawan mancanegara yang berkunjung di tahun 2018 terjadi penurunan yang dikategorikan cukup signifikan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melanjutkan berbagai upaya untuk melakukan pembangunan disertai pemberdayaan bidang pariwisata dengan melakukan pembangunan terhadap infrastruktur pendukungnya. Setiap kabupaten yang ada di Jawa Tengah saat ini sedang berlomba-lomba dalam mengembangkan pariwisatanya.

Rembang adalah salah satu bagian dari kabupaten di wilayah Jawa Tengah yang sedang melakukan pengembangan pariwisata seperti yang tertuang dalam Perda No. 12/2019 – Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Th. 2019 – 2025. Rembang memiliki banyak potensi wisata namun

banyak juga yang belum dieksplor. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki tugas pokok untuk mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Rembang. Dalam mengembangkan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak dapat bekerja sendiri melainkan melibatkan peran masyarakat dalam lingkup terkecil yaitu desa. Kabupaten Rembang saat ini sedang gencar membangun desa wisata, tujuannya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena apabila desa sebagai lingkup terkecil mampu meningkatkan perekonomian maka kesejahteraan masyarakat juga lebih terjamin.

Berikut disajikan data jumlah kunjungan wisatawan pada obyek pariwisata yang ada di Rembang :

Tabel 1.2

Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Kabupaten Rembang, 2015-2019

Tahun	Wisatawan/ Visitors		Jumlah/Total
	M mancanegara/ International	Domestik/ Domestic	
2015	230	63.977	64.207
2016	99	62.191	62.290
2017	443	69.827	70.270
2018	597	79.652	80.249
2019	313	79.848	80.161

Berdasarkan data pada tabel tersebut diketahui bahwa jumlah wisatawan domestik selalu mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2019 yang mengalami sedikit penurunan, sedangkan untuk jumlah wisatawan mancanegara selalu naik turun. Penurunan wisatawan pada tahun 2016 dan 2019 cukup signifikan.

Berikut jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan obyek wisata di Rembang :

Tabel 1.3  
Jumlah Wisatawan berdasarkan Obyek Wisata Tahun 2018

Obyek Wisata	Jumlah Wisatawan
Pantai Karang Jahe	1.039.191
Taman Rekreasi Pantai Kartini	186.425
Pantai Pasir Putih Wates	147.693
Makam Raden Ajeng (RA) Kartini	68.361
Agrowisata Dekampoeng Rembang	40.890
Museum RA. Kartini	33.136

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2018

Berdasarkan data pada tabel Jumlah Wisatawan berdasarkan Obyek Wisata Tahun 2018 diketahui bahwa jumlah wisatawan paling banyak mengunjungi Pantai Karang Jahe. Pantai Karang Jahe yaitu obyek wisata yang terletak di wilayah Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang. Desa Punjulharjo merupakan salah satu desa yang dikembangkan melalui kolaborasi *stakeholders* yang menjadikan pariwisata sebagai destinasi produktif. Jumlah total kunjungan dari wisatawan di Pantai Karang Jahe berhasil menjadi bagian dari jajaran 7 besar jumlah kunjungan oleh wisatawan di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2018. Perkembangan yang begitu pesat di Pantai Karang Jahe merupakan bukti keberhasilan kolaborasi *stakeholders* yang dilakukan.

Potensi wisata akan lebih mudah berkembang apabila pengelolaannya berbentuk kolaborasi yang melibatkan peran *stakeholders*. Kolaborasi merupakan kerjasama yang melibatkan para pemangku kepentingan yang bisa berasal dari pihak masyarakat, pihak pemerintah maupun pihak swasta. Pada dasarnya

kolaborasi *stakeholders* di Rembang dilakukan diberbagai sektor, namun saat ini yang sedang gencar dilakukan adalah kolaborasi *stakeholders* dalam mengembangkan bidang kepariwisataan di Kabupaten Rembang. Adanya kolaborasi *stakeholders* dalam mengembangkan pariwisata digunakan sebagai percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan potensi wisata, meningkatkan daya saing daerah sekaligus meningkatkan daya tarik wisatawan luar daerah agar mengenal lebih banyak mengenai potensi wisata yang ada di Rembang dan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pantai Karang Jahe adalah bagian potensi wisata yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang. Pengelolaan Pantai Karang Jahe awalnya dilakukan oleh masyarakat lokal namun seiring perkembangannya, masyarakat sadar bahwa dibutuhkan peran dari pihak lain yang lebih berkompeten di bidang kepariwisataan yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, selain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga terdapat peran yang dimiliki oleh instansi lain dan pihak lain yang meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Aparat Keamanan, Bank, Warga Desa Punjulharjo dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Semua yang berperan di Pantai Karang Jahe merupakan *stakeholders*.

Hadirnya obyek wisata berupa pantai Karang jahe bermula dari adanya kesadaran yang muncul untuk pengelolaan wisata Pantai Karang Jahe yang pada awal mulanya hanya dilakukan oleh badan pengelola dan masyarakat lokal Desa Punjulharjo. Kerjasama yang diperankan oleh setiap *stakeholders* dalam bentuk kolaborasi di Pantai Karang Jahe mampu memberikan dampak yang

signifikan terhadap proses pembangunan maupun pengembangan di tempat wisata tersebut. *Stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi di Pantai Karang Jahe Desa Punjulharjo Rembang memiliki perannya masing-masing. Berikut disajikan tabel peran masing-masing *stakeholders* dalam pemberdayaan desa wisata Punjulharjo Rembang :

Tabel 1.4  
Peran *Stakeholders* dalam Pemberdayaan Desa Wisata Punjulharjo Rembang

No	<i>Stakeholders</i>	Peran
1	Unit Pengelola Pantai Karang Jahe	Penanggung jawab kegiatan di Pantai Karang Jahe
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Fasilitator untuk pihak Pantai Karang Jahe
3	Dinas Kesehatan	Pelatihan kepada pemilik warung makanan di Pantai Karang Jahe
4	Dinas Lingkungan Hidup	Penyedia fasilitas yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan Pantai
5	Aparat Keamanan	Melakukan pengamanan di hari libur
6	Bank	Memberi bantuan dalam bentuk fasilitas di Pantai Karang Jahe
7	Warga Desa Punjulharjo	Pelaku wisata yang diberdayakan
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembinaan Pemerintah Desa
9	Pemerintah Desa	Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan
10	BUMDes	Meningkatkan perekonomian masyarakat di Pantai Karang Jahe
11	Kelompok Sadar Wisata	Memberi kesadaran wisata ke masyarakat
12	Karang Taruna	Membantu Pokdarwin melakukan penanaman

Sumber : Hasil Olahan Data dari berbagai sumber, 2020

Berdasarkan tabel peran masing-masing *stakeholders*, dapat dilihat bahwa setiap *stakeholders* mempunyai peran masing-masing disesuaikan berdasarkan kemampuan dan kewenangannya. Semua kegiatan yang dilakukan di

Pantai Karang Jahe harus meminta izin ke bagian Unit Pengelola Pantai Karang Jahe sebagai penanggung jawab segala kegiatan di Pantai Karang Jahe. *Stakeholders* dari dinas-dinas lebih berperann dalam memfasilitasi melalui pembinaan maupun bantuan fisik. Aparat keamanan seperti TNI dan POLRI juga ikut berperan untuk mengamankan Pantai Karang Jahe saat hari libur sedangkan peran dari bank yaitu memberikan bantuan fisik kepada pihak Pantai Karang Jahe.

Peran-peran yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholders* kemudian dikolaborasikan dengan tujuan memajukan Pantai Karang Jahe menjadi tempat wisata yang lebih baik. Kolaborasi *stakeholders* di Desa Punjulharjo dilakukan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat saat ini dijadikan prioritas publik karena dianggap sebagai suatu bentuk pendekatan yang tepat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Permasalahan sosial masyarakat yang belum tertuntaskan hingga saat ini adalah kemiskinan sehingga pemberdayaan dianggap paling efektif dalam mengatasi permasalahan ini karena melibatkan langsung masyarakat didalamnya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu bentuk upaya yang digencarkan oleh pemerintah maupun lembaga lain dengan tujuan untuk membangun kemandirian masyarakat menggunakan kemampuan atau potensi yang ada dalam dirinya agar mampu meningkatkan kualitas perekonomian dan kesejahteraan hidupnya.

UU Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1 ayat (2) menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat desa, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan potensi yang ada dalam diri masyarakat meliputi pengetahuan, sikap dan kemampuan yang dimiliki

untuk membangun kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat melalui pelaksanaan program sesuai fokus pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat mampu direalisasikan melalui berbagai bentuk program misalnya yaitu program desa wisata. Program pemberdayaan Desa Wisata merupakan bentuk program untuk memberdayakan masyarakat dengan tujuan memberikan kemampuan dan suatu bentuk usaha dalam pengentasan kemiskinan di desa melalui pengelolaan potensi lokal yang di miliki desa tersebut. Program desa wisata pada dasarnya ditujukan untuk memberi daya kepada desa agar mampu menyejahterakan masyarakat. Desa wisata dikembangkan untuk agar memiliki daya tarik wisatawan, mengenai desa wisata juga dijelaskan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 bahwa adanya program desa wisata bertujuan untuk membangun aktivitas perekonomian berbasis pariwisata sehingga dapat memberikan dampak penurunan angka urbanisasi dari desa ke kota selain itu desa wisata yang memanfaatkan potensi alam akan mendorong adanya pelestarian demi keberlanjutan desa wisata tersebut. Program desa wisata diharapkan mampu mengeksplor segala potensi wisata yang ada di Indonesia sekaligus memanfaatkan potensi tersebut untuk memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan masyarakat dibidang perekonomian.

Pengembangan desa wisata bisa menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan dengan melibatkan masyarakatnya secara langsung, ditambah dengan dukungan dari pemerintah dalam pengembangannya akan menjadi sebuah kolaborasi yang sangat baik. Desa Wisata adalah untuk menunjukkan keasrian dan

sebuah kawasan yang potensial. Perkembangan desa wisata akan memberikan dampak kepada dua bidang sekaligus yaitu dampak perekonomian dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengelola potensi desa dan yang kedua adalah dampak pada bidang lingkungan karena adanya desa wisata menuntut agar pelestarian lingkungan sangat diperhatikan untuk menjaga keasrian sebuah pedesaan dan menjaga keindahan untuk dinikmati wisatawan.

Suatu wilayah dikatakan berhasil menjalankan program desa wisata guna merealisasikan pemberdayaan masyarakat yaitu di Desa Punjulharjo, Rembang. Desa Punjulharjo telah menjadi kawasan desa wisata di Kabupaten Rembang yang bisa berdampak positif di bidang perekonomian untuk penduduk yang mendiami lokasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Rembang saat ini melakukan upaya untuk perkembangan desa wisata sebagai bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengurangi jumlah pengangguran, serta menekan jumlah kemiskinan.

Bentuk keberhasilan pemberdayaan oleh kolaborasi *stakeholders* di Desa Punjulharjo yaitu Desa Wisata yang menonjolkan *icon* pantainya yaitu Pantai Karang Jahe. Pantai Karang Jahe masuk dalam nominasi untuk mewakili Provinsi Jawa Tengah dalam lomba desa wisata nusantara 2019 tingkat nasional, dari 158 peserta desa wisata se-Indonesia yang telah diverifikasi atau di seleksi melalui kiriman video, tersisa 28 desa yang tersebar diseluruh Nusantara termasuk desa Punjulharjo yang telah memenuhi seleksi awal. (Pantja 2019 dalam [realitarayat.com](http://realitarayat.com)). Desa Punjulharjo dengan Pantai Karang Jahe mampu meraih juara 5 lomba desa wisata nusantara, keberhasilan ini merupakan contoh hasil

kolaborasi stakeholders yang sudah bekerjasama mengembangkan Pantai Karang Jahe. Juara desa wisata ini juga mampu memberikan dampak yang besar untuk meningkatkan eksistensi Pantai Karang Jahe sebagai ikon Kabupaten Rembang.

Adanya Desa Wisata Punjulharjo berhasil membuat masyarakat yang tinggal di Desa Punjulharjo mampu memberikan perubahan seperti peningkatan perekonomian masyarakat dari hasil pengembangan wisata Pantai Karang Jahe yang merupakan potensi andalan di Desa Punjulharjo. Masyarakat bukan hanya menjual keindahan pantai saja namun juga menyediakan berbagai permainan sebagai pendukung pariwisata Pantai Karang Jahe, selain itu masyarakat juga menyediakan *Home industry* olahan hasil laut.

Melaksanakan kolaborasi dalam pemberdayaan tergolong sulit, khususnya ketika mempertahankan kerjasama, karena membutuhkan persiapan yang mumpuni untuk setiap *stakeholders*. Terjadinya selisih pendapat dan perbedaan kepentingan sering menjadi pemicu permasalahan ketika pelaksanaan kolaborasi, misalnya permasalahan yang muncul dalam kolaborasi antar *stakeholders* di Pantai Karang Jahe yakni antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan para *stakeholders* lainnya, khususnya permasalahan dengan masyarakat Desa Punjulharjo. Permasalahan yang terjadi diakibatkan oleh rendahnya respon Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai fasilitator kolaborasi yang membidangi kepariwisataan terhadap aspirasi masyarakat Desa Punjulharjo yang disampaikan melalui BP KJB, hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas terkait.

Menurut Chris Ansell dan Alison Gash dalam penelitian Aulia Rahmawati tentang Kolaborasi Antar Daerah dalam Penyelesaian Konflik Antar Nelayan di Perairan Pacitan, Wonogiri dan Gunung Kidul (2016), proses kolaborasi *stakeholders* berhasil apabila mampu memenuhi komponen- komponen sebagai berikut :

#### 1. Dialog antar-muka (face to face dialogue)

Dialog antar-muka dilakukan merupakan bentuk pelaksanaan komunikasi antar *stakeholders*. Komunikasi ini menjadi sesuatu yang penting dalam berlangsungnya kolaborasi karena melalui komunikasi, masing-masing *stakeholders* mampu berpendapat ataupun memberikan masukan terhadap *stakeholders* lain untuk mencapai sebuah konsensus. Komunikasi yang dilakukan dalam kolaborasi yaitu komunikasi langsung yang melibatkan semua peran *stakeholders* sehingga keputusan akhir komunikasi nantinya bisa disepakati dengan adil. Komunikasi yang berlangsung dalam kolaborasi *stakeholders* di Desa Wisata Punjulharjo kurang terlaksana secara efektif, hal tersebut karena belum terdapat wadah khusus bagi para *stakeholders* yang berkolaborasi di Desa Wisata Punjulharjo, selain daripada itu, sering terjadi miskomunikasi akibat penyebaran informasi antar *stakeholders* yang tidak merata sehingga memicu terjadinya konflik antar *stakeholders*.

#### 2. Membangun kepercayaan (*trust building*)

Membangun kepercayaan adalah proses kolaborasi yang menjadi syarat bagi keberhasilan kolaborasi. Kolaborasi melibatkan banyak pihak sehingga kepercayaan harus dibangun sekuat mungkin dengan tujuan

memudahkan pelaksanaan peran dan pencapaian tujuan kolaborasi karena adanya kepercayaan antar stakeholders. Kepercayaan dibentuk melalui komunikasi yang intens antar stakeholders dan kepercayaan tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat sehingga membutuhkan janga waktu tertentu.

Kepercayaan antar stakeholders dalam kolaborasi stakeholders di Pantai Karang Jahe belum terbangun dengan baik, hal ini dikarenakan Pemkab Rembang kurang tanggap terhadap aspirasi masyarakat, hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat sehingga bertindak sesuai keinginan dan cenderung mengabaikan pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas terkait.

### 3. Komitmen pada proses kolaborasi (commitment to the process)

Komitmen adalah hal yang vital dalam kolaborasi karena cepat lambatnya pencapaian tujuan kolaborasi tergantung pada komitmen masing-masing *stakeholders*. Komitmen bahkan sangat terkait dengan kepercayaan antar stakeholders, apabila kepercayaan tinggi maka komitmen yang dibuat stakeholders juga akan kuat namun sebaliknya apabila kepercayaan rendah maka komitmen yang dibuat *stakeholders* tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dampaknya terjadi ketika pelaksanaan peran.

Komitmen yang terjalin antar stakeholders sudah baik, dibuktikan dengan keberhasilan Desa Punjulharjo sebagai desa wisata sebagai bukti kerja keras Dinas Kebudayaan dan Pariwisata , Unit Pengelola Pantai Karang Jahe, Pemerintah Desa Punjulharjo dan dengan melibatkan masyarakat.

#### 4. Pemahaman bersama (shared understanding)

Pemahaman bersama yaitu hal mendasar bagi sebuah kolaborasi. Dalam pemahaman bersama ini terdapat pemahaman mengenai kondisi awal yang melatar belakangi kolaborasi *stakeholders*, selain itu juga proses penyatuan visi misi dan tujuan antar *stakeholders*. Dari komponen pemahaman bersama dalam kolaborasi *stakeholders* di desa wisata Punjulharjo ada kepentingan masing-masing yang berbeda tetapi seluruh *stakeholders* yang terlibat memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui proses pemberdayaan. Proses pemahaman bersama terkait tujuan dan peran dalam kolaborasi ini dilakukan dengan menggunakan proses diskusi yang dihadiri oleh para *stakeholders* sebagai bentuk pertimbangan dalam pengambil keputusan sesuai asas demokrasi, namun dalam kolaborasi *stakeholders* yang terjalin di Desa Punjulharjo, terdapat peran dari beberapa *stakeholders* yang dominan dibandingkan *stakeholders* yang lain.

#### 5. Dampak sementara (intermediate outcomes)

Dampak sementara merupakan keberhasilan kecil yang diraih selama proses kolaborasi *stakeholders* dilakukan, dikatakan sementara karena keberhasilan ini bersifat temporer yang akan digantikan dengan keberhasilan-keberhasilan lain seiring berjalannya waktu. Dampak sementara ini bukan hasil akhir kolaborasi *stakeholders*. Dampak sementara ini sebagai bentuk hubungan timbal balik antar stakeholder yang berkolaborasi. Dampak sementara dalam bentuk kemenangan kecil ini mampu menumbuhkan sifat optimis para *stakeholders* untuk selalu meningkatkan perannya agar hasil

kolaborasi lebih memberikan dampak yang lebih luas. Dampak sementara dalam kolaborasi *stakeholders* di Desa Punjulharjo sudah cukup baik dilihat dari perkembangan pesat Pantai Karang Jahe sebagai bukti terjalin kolaborasi yang baik antar *stakeholders*.

Setelah disebutkan komponen-komponen dalam kolaborasi, ditemukan beberapa kendala pelaksanaan kolaborasi dalam pemberdayaan, baik kendala berupa rendahnya partisipasi ataupun kurang optimalnya kinerja *stakeholders* yang terlibat. Untuk mengatasi kendala yang terjadi di Desa Punjulharjo. Pemerintah Desa Punjulharjo ikut berperan dengan berupaya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan terkait pengembangan wisata melalui dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes yaitu organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa sebagai bentuk langkah pengelolaan usaha desa oleh masyarakat dalam usaha meningkatkan perekonomian desa, serta dibentuk sesuai kebutuhan dan bentuk potensi desa. Pemerintah Desa Punjulharjo membentuk BUMDes sebagai usaha mengelola potensi desa dengan harapan agar mampu berperan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Desa Punjulharjo. BUMDes dalam melaksanakan perannya melibatkan masyarakat secara langsung agar masyarakat memahami mengenai peluang ekonomi dari potensi yang ada.

Penelitian ini akan membahas tentang proses terbentuknya kolaborasi *stakeholders* di Pantai Karang Jahe Desa Punjulharjo dalam pemberdayaan masyarakat untuk memandirikan masyarakat di Desa Punjulharjo dan untuk

mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam kolaborasi stakeholder yang dilakukan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses terbentuknya kolaborasi *stakeholders* dalam pemberdayaan di Desa Wisata Punjulharjo Rembang?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam proses kolaborasi *stakeholders* di Desa Punjulharjo Rembang?

## **1.3 Tujuan**

1. Menggambarkan dan menganalisis proses terbentuknya kolaborasi *stakeholders* dalam pemberdayaan di Desa Wisata Punjulharjo Rembang.
2. Menggambarkan dan menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses kolaborasi *stakeholders* di Desa Punjulharjo Rembang

## **1.4 Manfaat**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dilakukan dengan harapam mampu memberikan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai proses kerjasama dengan baik untuk meningkatkan keajahteraan masyarakat dalam lingkup kolaborasi, menjadi referensi, dan mampu memberikan bantuan konseptual untuk penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### 1.4.2.1 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini digunakan untuk menambah pengetahuan yang berkaitan dengan Kolaborasi *Stakeholders* dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Punjulharjo. Penelitian ini juga bisa digunakan untuk memberikan pelatihan kemampuan dalam mengasah pemikiran kritis sekaligus memikirkan untuk penentuan solusi atas resiko masalah yang datang di masa depan.

#### 1.4.2.2 Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini mampu digunakan sebagai masukan bagi pemikiran dalam memanfaatkan analisis tentang kolaborasi *stakeholders* terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, kemudian dapat digunakan sebagai perbaikan sekaligus meningkatkan kinerja *stakeholders* dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Punjulharjo Rembang.

### **1.5 Kajian Teori**

#### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

**Tabel 1.5**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama Penulis, Judul Artikel dan Nama Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Utama	Kelemahan	Keunggulan
Odhiambo, Isaac. 2020. Stakeholder Collaborativ on Strategy and Implementati on of Girls' Educational Empowermen t Projects in Homa-Bay County, Kenya	Deskriptif dengan karakteristik kualitatif dan kuantitati f.	in Homa-Bay County, Kenya	kolaborasi pemangku kepentingan yang aktif dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi ketegangan dan konflik di sekitar proyek pemberdayaan pendidikan anak perempuan, ada beberapa studi empiris yang telah membangun hubungan antara strategi kolaborasi pemangku kepentingan dan efektivitas implementasi proyek-proyek ini.	Penelitian ini kurang menonjolkan/tidak spesifik di bagian strategi, hanya fokus dibagian kolaborasi dalam pemberdayaan nya	Penelitian ini membahas tentang kolaborasi stakeholders dalam pemberdayaan pendidikan anak perempuannya

Nama Penulis, Judul Artikel dan Nama Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Penelitian	Kelemahan	Keunggulan
<p>Sekou, Malek, dkk. 2019. Influence of Stakeholder Involvement on Development Project Performance in Guinea</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>in Guinea</p>	<p>Pembangunan Partisipatif yang mengarah pada bagaimana keterlibatan berbagai pemangku kepentingan akan mempengaruhi kinerja proyek-proyek pembangunan dalam organisasi. Pendekatan ini menggambarkan pemangku kepentingan sebagai cara yang kuat untuk memahami perusahaan dan lingkungannya.</p>	<p>Tidak ada data yang menunjukkan perbandingan antara kinerja sebelum adanya pemangku kepentingan dengan setelah adanya pemangku kepentingan</p>	<p>Penelitian ini mampu membuktikan bahwa pemangku kepentingan di Guinea sangat mempengaruhi hasil kinerja proyek pembangunan dalam organisasi</p>
<p>Nuray, Faruk, Ali. 2016. The Role of Stakeholders in Sustainable Tourism Development in Safranbolu, Turkey</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>In Safranbolu, Turkey</p>	<p>Semua pemangku kepentingan menyadari pentingnya Sustainable Tourism Development (STD) untuk masa depan. Pariwisata Berkelanjutan dianggap sebagai konsep</p>	<p>Belum diberikan rekomendasi paling sesuai dengan sustainable teourisme development di Safranbolu, Turkey</p>	<p>Semua pemangku kepentingan berusaha berkontribusi pada STD untuk memberikan pengalaman berkualitas tinggi</p>

Nama Penulis, Judul Artikel dan Nama Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Penelitian	Kelemahan	Kelebihan
			pengembangan yang paling tepat.		bagi wisatawan
Saroyini, Putu. 2018. The Relationship Among Community Based Tourism Application, Community Attitude, Community Empowerment and Community Life Satisfaction	Deskriptif Kuantitatif	Di Bali	Pemberdayaan memainkan peran moderat untuk mengurangi sikap negatif masyarakat terhadap aktivitas pariwisata dan kepuasan hidup dengan yang lebih besar. Dianjurkan untuk menggunakan sumber energi terbarukan (RES) yang akan memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.	Belum memberikan rekomendasi kepada pemerintah secara spesifik terkait pemberdayaan yang dilakukan dan hanya fokus ke kebiasaan masyarakat di daerah lokus penelitian	Mampu mendapatkan hasil penelitian mengenai pengaruh pemberdayaan di daerah Bali terhadap sikap negatif masyarakat untuk meminimalisir resiko kedepannya

Nama Penulis, Judul Artikel dan Nama Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Penelitian	Kelemahan	Keunggulan
Leonnhard, Anna. 2017. Stakeholder empowerment through participatory planning practices: The case of electricity transmission lines in France and Norway	Deskriptif Kuantitatif	Perancis dan Norwegia	Hasilnya menunjukkan bahwa peraturan perencanaan saat ini dapat mengambil manfaat dari pemberdayaan pemangku kepentingan tingkat tinggi, terutama pada fase awal proses perencanaan.	Belum diberikan data spesifik tentang pemangku kepentingan yang terkena dampak dari hasil perencanaan ini	Penelitian ini mampu mengungkapkan tren peningkatan tingkat pemberdayaan, terutama dalam fase awal prosedur perencanaan,
Rizka. 2018. Kolaborasi Stakeholders dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang)	Deskriptif Kualitatif	Di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang	<i>Stakeholders</i> yang rendah kesadarannya adalah pemerintah desa. Akibat dari pemberdayaan seperti partisipasi masyarakat meningkat di bidang ekonomi dan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, mampu membuka lapangan pekerjaan, jumlah peserta yang tergabung di PAUD	Penelitian fokus ke pemberdayaan nya dan kurang fokus di bagian kolaborasi stakeholdersnya	Penelitian ini memberikan data yang rinci mengenai segala kegiatan pemberdayaan yang ada di Desa Wonoyoso, Kecamatan pringapus, Kabupaten Semarang

Nama Penulis, Judul Artikel dan Nama Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Penelitian	Kelemahan	Kelebihan
			masih minim, serta muncul rasa iri atau juga disebut bentuk ketidakadilan terkait bagian mereka dalam peran musrendes.		
Djamaludin. 2017. Kolaborasi Multi Stakeholders dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Undang	Deskripsi Kualitatif	Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang	Unsur R dominan di fase pengembangan kapasitas dan fase pengembangan prakarsa dan aktivitas pada semua tingkatan kolaborasi multi stakeholder. Unsur O dominan pada fase pengembangan organisasi, sedangkan di fase pengembangan lain tidak memiliki kontribusi yang signifikan dan ketiga, unsure N dominan pada fase pengembangan persiapan social dan fase pengembangan perluasan	Kurang menonjolkan proses-proses kolaborasi	Mampu membuktikan unsur pembangunan dalam memberdayakan masyarakat secara rinci

Nama Penulis, Judul Artikel dan Nama Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Penelitian	Kelemahan	Kelebihan
			dan keberlanjutan.		
Mia. 2017. Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata	Deskripsi Kualitatif	Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi	Komponen pemahaman bersama, mutualitas, dan administrasi merupakan komponen yang mendorong kolaborasi mampu berlangsung dan dapat melakukan pencapaian tujuan pembangunan inklusif walaupun masih muncul konflik antar <i>stakeholders</i> .	Belum disajikan tabel hasil kolaborasi dalam pembangunan inklusif	Meneliti kolaborasi stakeholders dalam teori pembangunan inklusif yang belum pernah dilakukan banyak orang
Ni'mah, Simon, Dedy. 2019. Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Talang Air	Deskripsi Kualitatif	Kelurahan Pajaresuk, Kabupaten Pringsewu	Setiap <i>stakeholders</i> yang berperan mampu melakukan berbagai macam bentuk upaya untuk pengembangan fisik maupun pengembangan non-fisik. Kerjasama disertai komunikasi yang dilakukan	Belum diberikan rekomendasi yang spesifik berdasarkan kerjasama yang telah berlangsung di Pengembangan Wisata Talang Air	Mampu memberikan gambaran fenomena yang jelas dan mudah dimengerti melalui upaya-upaya pengembangan fisik dan non-fisik selama kerjasama berlangsung

			antar <i>stakeholders</i>		
Nama Penulis, Judul Artikel dan Nama Jurnal	Metode	Lokus	Temuan Penelitian	Kelemahan	Kelebihan
			sehingga mampu mempercepat setiap proses implementasi pengembangan pariwisata Talang Air.		
Fitri. Hardi.2017. Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang	Deskripsi Kualitatif	Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang	Bentuk kerjasama yang dilakukan dalam proses pengembangan Pantai Karang Jahe bersifat sukarela dan “ <i>give and take</i> ” atau kemitraan yang bersifat mutualistic, artinya yaitu kedua pihak yang bekerjasama mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama yang dilakukan.	Kurang menonjolkan bagian manajemen jejaring dan lebih banyak membahas mengenai peran stakeholders	Mampu membuat gambaran rinci mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jejaring kerjasama antar stakeholders yang terlibat

## **1.5.2 Administrasi Publik**

### **1.5.2.1 Definisi**

Administrasi Publik secara etimologis berasal dari Bahasa latin yang memiliki arti “membantu, melayani, atau memenuhi”, dan kata administration yang mempunyai makna “ pemberian bantuan, pemeliharaan, pengelolaan” (Okto,2019). Administrasi kemudian dideskripsikan dalam Bahasa belanda sebagai tata usaha atau administrasi dalam arti sempit dan bestuur yang berarti bahwa manajemen terhadap kegiatan dalam organisasi sedangkan beheer berarti manajemen untuk sumber daya yang ada. Administrasi sering diartikan sebagai proses pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh individu maupun kelompok demi mencapai tujuan secara efektif.

Adanya istilah Administrasi Publik berarti berbicara mengenai peran pemerintah sebagai pihak tunggal yang memiliki otoritas untuk membuat regulasi. Pemerintah bertindak dengan aktif dan selalu berinisiatif untuk melakukan pengaturan atau pengambilan langkah yang dianggap baik untuk masyarakat karena dalam hal ini masyarakat dianggap sebagai pihak yang pasif dan kurang memiliki kemampuan sehingga harus tunduk dan menjadi pengikut aturan pemerintah. Istilah administrasi juga berarti sebuah konteks yang lebih baik dari definisi administrasi yang sebelumnya dimana pemerintah memiliki peran yang lebih untuk melaksanakan misi dalam melayani masyarakat.

Pada dasarnya istilah administrasi publik adalah sebuah konsep yang berfokus pada program pemberdayaan masyarakat, lebih memprioritaskan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena kesempatan pemerintah yang diberikan. Dalam hal ini, kegiatan pemerintah cenderung lebih ditujukan untuk “empowerment” yakni pemerintah berusaha untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat supaya mampu dalam mengatur kehidupan tanpa adanya ketergantungan terhadap pemerintah.

Sondang P.Siagian dalam Oktorandesta (2018) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang disepakati dan dilakukan oleh dua individu atau lebih untuk mencapai tujuan. Dwight Waldo dalam Oktorandesta (2018) mendefinisikan administrasi sebagai “Cooperative rational action” yakni proses pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan efektif dan efisien demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dwight Waldo juga mendefinisikan Administrasi Publik sebagai organisasi dan manajemen sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Woodrow Wilson dalam oktorandesta mendefinisikan administrasi public sebagai bentuk urusan atau praktek urusan pemerintah karena memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara efektif dengan melakukan pekerjaan public. Nigro dan Nigro juga mendefinisikan administrasi public sebagai upaya kerjasama oleh kelompok didalam suatu organisasi yang meliputi eksekutif, yudikatif dan

legislative sehingga menjadi bagian dari proses politik yang berkaitan dengan sektor swasta dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Dari definisi yang sudah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa administrasi public merupakan proses kerjasama yang dilakukan dua pihak atau lebih dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

### **1.5.2.2 Ruang Lingkup Administrasi Publik**

Ada cara untuk mengamati cakupan atau ruang lingkup praktis administrasi public dari suatu Negara melalui pengamatan terhadap lembaga departemen maupun non-departemen yang ada. Chandler dan Plano dalam (Keban, 2014) menjelaskan bahwa apabila dalam hidup menjadi terasa semakin rumit dengan permasalahan yang ada maka yang ditanggung oleh pemerintah maupun administrasi public juga semakin rumit. Sesuai dengan buku yang ditulis oleh Nicholas Henry (dalam keban, 2014) membagi ruang lingkup yang dapat diamati dari topic-topik yang sedang dibahas, antara lain :

1. Organisasi Publik

Organisasi publik pada dasarnya berkaitan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi

2. Manajemen Publik

Manajemen public berkaitan dengan proses system dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas , anggaran public dan manajemen sumber daya manusia.

3. Implementasi yakni berkaitan dengan pendekatan pada kebijakan public dan ismplementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

### **1.5.2.3 Paradigma Administrasi Publik**

Nicholas Henry dalam Keban (2014:31-33) mengemukakan enam paradigma secara rinci administrasi negara, yaitu :

Nicholas Hendry dalam Keban (2014:31-33) mengklasifikasikan enam paradigma administrasi negara secara detail sebagai berikut :

1. Paradigma Pertama (Dikotomi Politik – Administrasi, 1900-1926)

Tokoh yang dikenal dalam paradigam pertama ini yaitu Frank J.Goodnow yang menyampaikan pendapatnya mengenai politik yang perhatiannya berpusat untuk kebijakan maupun ekspesi keinginan Negara, serta administrasi menyangkut implementasi kebijakan trsebut. Paradigm pertama ini lebih menekankan pada lokusnya seperti pada birokrasi pemerintah.

2. Paradigma Kedua (Prinsip-prinsip Administrasi Negara, 1927 – 1937)

Gullick dan Urwick menjelaskan mengenai administrasi sebagai sebuah ilmu yang wajib memiliki prinsip, dimana prinsip tersebut dicurahkan dalam POSDCORB. Lokus dalam penelitian ini bersifat abstrak.

3. Paradigma Ketiga (Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik, 1956-1970)

Paradigma ini mengalami krisis identitas yang disebabkan oleh adanya ilmu politik yang dianggap sebagai disiplin ilmu yang dominan terhadap dunia administrasi Negara, lokus dalam paradigma ini berupa birokrasi pemerintah sedangkan fokusnya bersifat abstrak.

4. Paradigma Keempat yaitu Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigm keempat ini menjelaskan mengenai prinsip-prinsip manajemen yang berkembang sebelumnya kemudian dikembangkan lagi lebih mendalam melalui cara ilmiah. Fokus paradig ini meliputi perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi yang moders, analisa system riset operasi. Seluruh fokus yang dianggap bisa diterapkan di bidang administrasi public tidak hanya dunia bisnis sehingga lokusnya tidak jelas.

5. Paradigma Kelima (Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik, 1970-sekarang)

Paradigm kelima ini memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus tersebut berupa teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan public sedangkan lokusnya terletak pada permasalahan dan kepentingan masyarakat.

6. Paradigma Keenam (Paradigma terbaru)

Paradigm yang terakhir ini menjadi paradig terbaru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan dalam ilmu administrasi publik. Pandji Santosa dalam bukunya “Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good

Governance” mendefinisikan bahwa paradig terbaru ini memiliki tiga tiang dalam governance yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan paradigma yang ada, dapat dilihat bahwa terkandung beberapa elemen penting dalam administrasi publik terkait dengan pemerintah dan masyarakat (publik), sehingga fokus administrasi publik tidak hanya pada pemerintahan saja melainkan juga berfokus pada masyarakat. Penelitian kolaborasi stakeholders dalam pemberdayaan termasuk dalam paradig keenam dimana dalam kolaborasi ini terjalin kerjasama yang efektif antara pemerintah, swasta dan masyarakat tanpa batas untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya.

#### **1.4 Manajemen Publik**

Overman (Ott, Hyde, dan Shafritz) ( dalam Keban 2014 : 92-93) menjelaskan mengenai manajemen publik tidak bagian dari *scientific management* walaupun memiliki pengaruh. Manajemen publik bukanlah *policy analysis*, juga tidak “ administrasi publik baru “, maupun kerangka yang lebih baru, namun manajemen publik mencerminkan adanya tekanan antara orientasi instrument pada satu pihak dan orientasi politik di pihak lain, manajemen publik merupakan sebuah studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, serta gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* di satu sisi,

dengan sumberdaya manusia, keuangan, phisik, informasi, dan politik di sisi lain.

Berdasarkan Woodrow Wilson(dalam abdul 2014 ), secara khusus manajemen publik menunjuk pada manajemen instansi pemerintah sebagai berikut :

- 1.Pemerintah sebagai setting utama organisasi.
- 2.Fungsi eksekutif sebagai fokus utama.
- 3.Prinsip manajemen sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi.
- 4.Metode perbandingan sebagai metode pengembangan bidang administrasi publik.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen public merupakan manajemen pemerintah melalui proses manajemen yang meliputi planning, organizing, controlling untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### **1.5.4 Kolaborasi *Stakeholders***

##### **1.5.4.1 Konsep Kolaborasi**

Kolaborasi berasal dari kata ‘co-labor’ yang artinya ‘bersama bekerja’. Makna dari konteks ‘bersama-bekerja’ menurut Salman dalam Djamaludin (2017) adalah ‘saling berinteraksi’ dan ‘saling berkontribusi’. O’leary, et al. Dalam Nikoyan (2015) menjelaskan bahwa kolaborasi adalah proses memfasilitasi dan mengoperasikan pengaturan multiorganisasional untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat

dilakukan atau tidak mudah dipecahkan oleh organisasi tunggal. Adanya kolaborasi digunakan sebagai proses pelibatan semua *stakeholders* dalam sebuah kerjasama untuk membangun hubungan dalam meraih tujuan bersama. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga atau pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung. ( Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2014).

Menurut Huxman dan Macdonald dalam Nikoyan (2015), terdapat tiga pola kemitraan yang mungkin terjadi pada tingkat antar organisasi :

- 1). Koordinasi yaitu tidak memungkinkan adanya komunikasi secara langsung antar pihak, namun antar *stakeholders* memberikan pertimbangan terkait peran satu sama lain sesuai kesepakatan yang dibuat.
- 2). Kerja sama, (cooperation) yaitu *stakeholders* saling melakukan interaksi dalam proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.
- 3). Kolaborasi (collaboration) yaitu ketika *stakeholders* melakukan kerjasama sesuai misi yang dimiliki untuk pencapaian tujuan individual maupun tujuan kolaborasi.

Kolaborasi menurut Salman dalam Rizka (2018) mengandung unsur-unsur pembangunan yang dapat disinergikan, diantaranya :

1. *Resources* (Sumber Daya) terdiri dari jumlah jenis, kondisi sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya manusia, hingga sumber daya fisik yang dimiliki.
2. *Organization* (Organisasi) terdiri dari sumber daya manusia yang berperan untuk mengintegrasikan keseluruhan sumber daya yang tersedia.
3. *Norms* (Norma), berkaitan dengan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kolaborasi dan terkait dengan pemberian penghargaan kepada mekanisme yang digunakan.

Berikut ini akan dijelaskan tiga komponen kolaborasi menurut Robert Agranoff dan Michael McGuire dalam Mia (2017), lima dimensi kolaborasi menurut Thomson dan Perry dalam Mia (2017), lima komponen kolaborasi menurut Ansell dan Gash Mia (2017), dan lima komponen menurut Roberts et al. Dalam Mia (2017) :

- a.) Robert Agranoff dan Michael McGuire Agranoff dan McGuire melihat kolaborasi dapat menggunakan komponen yang disebutkan sebagai berikut:

#### 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan bagian penting dalam kolaborasi yang perlu dilakukan secara langsung dan intensif. Komunikasi kolaborasi bisa dilaksanakan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi kolaborasi secara tidak langsung dilakukan melalui online atau perantara teknologi misalnya zoom, Microsoft

teams, dan lainnya. Komunikasi secara tidak langsung dapat digunakan sebagai solusi komunikasi antar *stakeholders* yang sedang berkonflik.

## 2.Nilai tambah

Nilai yang dihasilkan dari proses efisiensi, adanya demokrasi dalam setiap institusi dan adanya proses kolaborasi. Dalam menciptakan nilai publik juga terdapat permasalahan yang muncul meliputi tingkat kepentingan masing-masing, urgensi, batas ruang lingkup yang meranah pada posisi lintas-sektoral, yang memberikan kesadaran mengenai Pemerintah belum mampu menciptakan bagian yang dinilai penting dari nilai publik atau nilai public yang ada (Muqorrobin, 2016:41), hal ini membuat diperlukannya kolaborasi diluar instansi pemerintah.

## 3.Deliberasi

Deliberasi diartikan sebagai bentuk kelebihan dan kekurangan dalam kolaborasi yang memberikan pelajaran timbal balik menguntungkan (*mutual learning*), membangun komunitas (*building communities*) serta memanfaatkan proses interaktif (*employing interactive*).

- b.) Ann Marie Thomson dan James L. Perry dalam tulisannya yang berjudul “*Collaboration Processes: Inside The Black Box*” memiliki pendapat mengenai 5 (lima) kunci dimensi kolaborasi, yaitu sebagai berikut:

1. Dimensi Tata Pemerintahan (The Process of Collaborative Governing: The Governance Dimension)

Dimensi tata pemerintahan merupakan dimensi tentang pengambilan keputusan yang dilakukan bersama (*joint decision making*), pemberian kemampuan, dan pemecahan masalah. Dimensi ini memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti

- (1) Struktur hierarki dan otoritas tidak mendominasi;
- (2) Kesadaran mengenai *stakeholders* yang berkolaborasi bukan hanya bertanggung jawab langsung untuk membangun kesepakatan namun juga wajib memberikan paksaan terkait keputusan terhadap diri mereka sendiri.
- (3) Ketersediaan sebagai penerimaan bahwa seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi memiliki untuk menerima bahwa semua pihak yang berkolaborasi memiliki peran yang sah sehingga akan didapatkan hasil yang mencerminkan terbentuknya konsesus kelompok, tidak berupa kekuatan koalisi maupun kekuatan politik;
- (4) Pemahaman tentang pemerintahan yang harus mampu menekan keterbukaan informasi, menghargai pendapat *stakeholders* lain , dan adanya proses negosiasi yang dilalui untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama.

## 2. Dimensi Administrasi (The Process of Collaborative: The Administration Dimension)

Dimensi administrasi merupakan dimensi yang sangat penting untuk keberlangsungan hubungan antar *stakeholders* yang melakukan kolaborasi. Adanya struktur administrasi saat melakukan kolaborasi merupakan posisi sentral dimana digunakan untuk proses koordinasi komunikasi, proses pengorganisasian dan proses penyebaran informasi serta berupaya agar *stakeholders* yang melakukan kolaborasi secara bersama-sama melakukan pengaturan mengenai hubungan yang dijalin oleh mereka, kemudian Freitag dan Winkler menyebutnya sebagai “sosial koordinasi”. Indikator yang terdapat dalam dimensi administrasi meliputi adanya peran yang jelas, kejelasan tanggung jawab yang dimiliki oleh aktor, pertemuan untuk kerja sama berjalan efektif, adanya kejelasan tujuan yang dicapai, pengkoordinasian tugas yang dilakukan dengan baik, memiliki saluran komunikasi yang resmi, serta melakukan pengawasan selama pelaksanaan kolaborasi (Thomson, Perry, and Miller dalam Mia 2017).

## 3. Dimensi Otonomi (The Process of Reconciling Individual and Collective Interest: The Autonomy Dimension)

Dimensi otonomi berkaitan dengan hubungan yang bertentangan antara kontrol bersama dengan kontrol individu. Selama berlangsungnya kolaborasi, *stakeholders* yang terlibat untuk melindungi identitas masing-masing yaitu dengan melakukan kontrol terhadap individu. Bertentangan

dengan kontrol individu, kontrol bersama melibatkan ketersediaan kolaborator untuk memberikan informasi, tidak sekedar tentang aktivitas organisasi mereka, namun juga berhubungan dengan apa yang mereka mampu dan tidak mampu dalam melakukan kolaborasi. Dimensi otonomi mencoba untuk memahami krisis yang implisit antara keinginan masing-masing *stakeholders* dan keinginan bersama. Indikator yang dimiliki dimensi otonomi ini berhubungan dengan tingkat pemahaman *stakeholders* mengamati kolaborasi sebagai penghalang bagi pencapaian misi organisasi, adanya kepercayaan mengenai keuntungan yang dipengaruhi oleh proses kolaborasi, kesadaran *stakeholders* untuk berupaya mewujudkan harapan yang dimiliki oleh organisasi serta harapan yang berasal dari *stakeholders* lain dalam kolaborasi.

#### 4. Dimensi Mutualitas (The Process of Forging Mutually Beneficial Relationship: The Mutuality Dimension)

Dimensi mutualitas berdasar pada hubungan ketergantungan. Setiap organisasi harus mampu menjalani hubungan saling ketergantungan ketika dalam kepentingan yang sama ataupun kepentingan yang berbeda, yang selanjutnya disebut oleh Powell dalam Mia (2017) sebagai “*complementarities*”. Komplementaritas adalah situasi ketika suatu organisasi mampu memberikan pengorbanan haknya guna mendapatkan kekuatan dari organisasi lainnya demi memenuhi kepentingan milik mereka sendiri. Adanya saling ketergantungan dalam

kolaborasi adalah dasar penting bagi hubungan *stakeholders* supaya berjalan dengan baik.

5. Proses Membangun Norma Sosial: Kepercayaan dan Dimensi Timbal Balik (*The Process of Building Social Capital Norms: The Trust and Reciprocity Dimension*)

Suatu kolaborasi yang dilaksanakan *stakeholders* akan menunjukkan mengenai kesiapan dalam berinteraksi ketika berkolaborasi, apabila *stakeholders* yang lain menunjukkan kesiapan yang sama, hal ini disebut sebagai hubungan timbal balik yang akan membangun kepercayaan antar *stakeholders* yang terlibat untuk berkolaborasi apabila dilakukan secara berulang-ulang. Kepercayaan antar *stakeholders* yang berkolaborasi mampu memberi manfaat bagi keberlangsungan kolaborasi, yaitu: (1) membangun itikad dengan baik, *stakeholders* dalam kolaborasi mampu berperilaku sesuai dengan komitmen eksplisit dan implisit, (2) berperilaku jujur dalam proses negosiasi dalam bentuk apapun; (3) *stakeholders* yang melakukan kolaborasi tidak untuk mengambil keuntungan yang lebih walaupun memiliki kesempatan (Cummings dan Bromiley).

- c.) Menurut Chris Ansell dan Alison Gash dalam penelitian Aulia Rahmawati tentang Kolaborasi Antar Daerah dalam Penyelesaian Konflik Antar Nelayan di Perairan Pacitan, Wonogiri dan Gunung Kidul (2016), proses kolaborasi *stakeholders* berhasil apabila mampu memenuhi komponen-komponen sebagai berikut :

### 1. Dialog antar-muka (*face to face dialogue*)

Dialog antar-muka merupakan bentuk komunikasi sebagai bagian penting dalam pelaksanaan kolaborasi, sebab terdapat proses pembentukan konsensus. Komunikasi langsung (*face to face*) adalah sebuah usaha untuk meminimalisir adanya *stereotype* (persepsi *stakeholders* yang memandang adanya sisi buruk *stakeholders* lain) dan meningkatkan sikap saling menghormati antar *stakeholders*. Adanya proses komunikasi secara langsung, maka para *stakeholders* yang berperan dalam kolaborasi mampu lebih objektif ketika berinteraksi.

### 2. Membangun kepercayaan (*trust building*)

Membentuk kepercayaan adalah syarat yang dibutuhkan untuk membentuk kolaborasi yang kuat. Membangun kepercayaan membutuhkan waktu yang cukup lama sebab ketika melaksanakan kolaborasi dibutuhkan komunikasi yang berlangsung secara intensif (terus-menerus) dan penyesuaian terhadap kondisi sekarang mulai munculnya kembali konflik dari masa lalu (*prehistory antagonism*).

### 3. Komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*)

Komitmen adalah bagian yang termasuk kategori sangat penting dalam pelaksanaan proses kolaborasi. Komitmen berhubungan erat dengan motivasi murni dari para *stakeholders* dalam kolaborasi. Komitmen

juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti (1) *mutual recognition* yang merupakan proses pengakuan bersama; (2) *joint appreciation* yang merupakan bentuk apresiasi bersama oleh para *stakeholders*; (3) membangun kepercayaan antar *stakeholders*; (4) *ownership the process* (rasa memiliki pada proses), hal tersebut berhubungan dengan pengaruh setiap *stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan namun terjadi kesulitan karena terdapat kompleksitas dalam kolaborasi; (5) *interdependence* yang merupakan hubungan ketergantungan antar *stakeholders*. Perbedaan kekuatan oleh para *stakeholders* menimbulkan rasa saling ketergantungan yang mampu membesarkan dan memperkuat komitmen.

#### 4. Pemahaman bersama (*shared understanding*)

Pemahaman bersama menjadi bagian yang penting dalam proses pencapaian tujuan bersama. Pemahaman bersama bisa didefinisikan sebagai *common mission* (misi umum), *common purpose* (tujuan umum), *common objectives* (obyektivitas umum), dan *shared vision* (visi bersama). Pemahaman bersama ini merupakan proses penyatuan pemikiran dan tujuan untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman yang terjadi antar *stakeholders*.

#### 5. Dampak sementara (*intermediate outcomes*)

Dampak sementara merupakan bentuk hasil selama proses kolaborasi berlangsung, maka dari itu tersemat kata “sementara”. Dampak sementara menghasilkan umpan balik. Umpan balik yang

diharapkan merupakan umpan balik yang bersifat positif, hal ini disebut “small-wins” (kemenangan kecil) atau Roberts dan Bradley menyebutnya sebagai *temporal property*. Kemenangan kecil sebagai bentuk hasil kolaborasi ini bermanfaat untuk meningkatkan harapan setiap *stakeholders* dalam kolaborasi agar mampu meningkatkan kepercayaan serta komitmen.

d.) Debbie Roberts, Rene van Wyk, dan Nalesh Dhanpat

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan oleh Roberts et al. (2016: 4-6) berjudul “*Exploring Practices for Effective Collaboration*” terdapat lima kunci kolaborasi, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Umum (*common purpose*)

Visi bersama merupakan komponen kunci kolaborasi yang dapat membawa setiap *stakeholders* tetap bekerjasama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

2. Mutualitas (*mutuality*)

Mutualitas terjadi ketika setiap pihak *stakeholders* memberikan peran sumber daya sehingga pihak lain mampu mendapatkan manfaat, contohnya melakukan tukar informasi. Kesamaan misi, budaya, dan komitmen terhadap tujuan kolaborasi mampu membantu memfasilitasi pertukaran sumberdaya.

3. Lingkungan yang memungkinkan (*enabling environment*)

Lingkungan kolaboratif meliputi lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin kolaborasi. Lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang tergolong kuat terhadap kinerja para *stakeholders* dalam menjalankan proses kolaborasi. Kepemimpinan memiliki kontribusi yang penting untuk menciptakan dan mempertahankan sebuah lingkungan kolaboratif dengan cara menghubungkan keahlian dan pengetahuan para *stakeholders*.

#### 4. Kepercayaan (*trust*)

Kepercayaan merupakan suatu faktor yang paling mendasari keberhasilan proses kolaborasi. Kepercayaan berdasarkan pada keyakinan bahwa para *stakeholders* akan berperilaku jujur menjalankan perjanjian dan mematuhi komitmen yang sudah mereka buat serta tidak melakukan eksploitasi terhadap pihak lain. Terjadinya kontrol formal yang berlebih dalam kolaborasi dapat berdampak pada kurangnya kepercayaan antar *stakeholders* karena kontrol dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap kemampuan dan karakter para *stakeholders*.

#### 5. Karakteristik pribadi tertentu (*specific personal characteristics*)

Dalam melakukan proses kolaborasi, para *stakeholders* harus mampu saling terbuka dan mampu memahami motif dan kepentingan *stakeholders* lain. Pemahaman karakteristik *stakeholders* yang berkolaborasi dapat memicu tumbuhnya kompromi sebagai bentuk

konsekuensi dari proses pembuatan keputusan bersama yang didalamnya terdapat kepentingan *stakeholders* yang tidak terjawab dalam pengambilan keputusan tersebut.

#### 1.5.4.2 Konsep Stakeholder

1. Definisi *stakeholders* menurut para ahli yaitu:

- a. Menurut Hetifah dalam Reski dkk (2016:160) *stakeholders* diartikan sebagai seseorang, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi (baik positif maupun negatif) oleh suatu kegiatan maupun program pembangunan.
- b. Menurut Freeman dalam Ni'mah (2018 : 11) bahwa *stakeholders* merupakan kelompok atau seseorang yang mampu memberikan pengaruh maupun dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan suatu program.
- c. Gonslaves dalam Ni'mah (2018 : 11) mendefinisikan *stakeholders* sebagai pihak yang memberikan dampak atau pihak yang mendapat dampak dari sebuah kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan.
- d. Reed et al dalam Santoso dkk (2015:200) berpendapat bahwa *stakeholders* merupakan pihak yang memberikan pengaruh atau dipengaruhi oleh pencapaian sasaran organisasi.
- e. Menurut Fletcher et al dalam Santoso dkk (2015:200) *stakeholders* didefinisikan sebagai pihak yang memiliki pertimbangan terhadap

suatu kebutuhan atau perhatian terhadap permasalahan. Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa *stakeholders* merupakan seseorang maupun kelompok yang berperan aktif dalam suatu kegiatan dan terkena dampak secara positif maupun secara negatif dari hasil proses pelaksanaan kegiatan.

## 2. Klasifikasi Peran Stakeholder menurut para ahli yaitu:

- a. Menurut Crosby dalam Ni'mah (2018) pemangku kepentingan (*stakeholders*) dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:
  1. Pemangku kepentingan utama, merupakan individu atau kelompok yang terkena dampak positif atau negatif dari suatu kegiatan contohnya kolaborasi.
  2. Pemangku kepentingan penunjang, merupakan individu atau kelompok yang memiliki peran sebagai perantara dalam membantu proses penyampaian pelaksanaan kegiatan. *Stakeholders* penunjang mampu digolongkan sebagai individu atau kelompok penyedia dana, pihak pelaksana, pihak pengawas, serta organisasi advokasi seperti organisasi pemerintahan, LSM, dan pihak swasta.
  3. Pemangku kepentingan kunci, yaitu individu atau kelompok yang mempunyai pengaruh yang kuat dan juga penting berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan, dan perhatian terhadap pelaksanaan kegiatan.

- b. Menurut Townsley dalam Wakka (2014:50) mengklasifikasikan *stakeholders* menjadi dua yaitu:
1. *Stakeholders* primer merupakan individu atau kelompok yang memiliki hubungan langsung terhadap sumber daya yang ada, baik digunakan sebagai mata pencaharian maupun terlibat secara langsung dalam proses eksploitasi.
  2. *Stakeholders* sekunder merupakan individu atau kelompok yang mempunyai minat atau keterkaitan secara tidak langsung, atau juga disebut sebagai pihak yang memiliki ketergantungan terhadap sebagian kekayaan atau bisnis yang dihasilkan oleh sumber daya.
- c. Menurut Santoso dkk (2015:201) pemangku kepentingan (*stakeholders*) dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:
1. *Key player*, adalah *stakeholders* yang terlibat aktif dalam berperan karena memiliki keterkaitan dan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan suatu proyek.
  2. *Context setter*, mempunyai pengaruh yang tergolong tinggi namun memiliki keterkaitan sehingga dapat menjadi risiko signifikan untuk dipantau.
  3. *Crowd*, merupakan pemangku kepentingan yang mempunyai sedikit keterkaitan dan pengaruh terhadap hasil yang diharapkan, adanya hal ini mampu menjadi bahan pertimbangan untuk melibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

- d. Menurut Wheeler dan Sillanpaa dalam Heene dkk (2015:158) mengklasifikasikan *stakeholders* menjadi *stakeholders* primer dan sekunder, sebagai berikut :

Tabel 1.6  
Model Klasifikasi *Stakeholders* dari Wheeler dan Sillanpaa

	<b>SOSIAL</b>	<b>NONSOSIAL</b>
<b>PRIMER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Investor</li> <li>- Memiliki Personil</li> <li>- Terdapat Pelanggan</li> <li>- Masyarakat setempat</li> <li>- Adanya penyuplai dan rekan bisnis, dan sebagainya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-lingkungan fisik</li> <li>-generasi penerus, dan sebagainya</li> </ul>
<b>SEKUNDER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun Peraturan</li> <li>- Memiliki kelompok kepentingan</li> <li>-media –para ilmuwan</li> <li>- Adanya pesaing, dan sebagainya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-lingkungan organisasi</li> <li>-organisasi pecinta binatang, dan sebagainya</li> </ul>

Sumber: Heene dkk (2015:158)

*Stakeholders* dibagi menjadi 3 kelompok (Maryono et al.2005) dalam penelitian Fitri (2017), antara lain:

a. *Stakeholders* primer

*Stakeholders* primer adalah *stakeholders* yang menjadi pihak terdampak langsung baik berupa dampak positif maupun dampak negatif dari sebuah rencana dan memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan yang dilakukan. *Stakeholders* yang memiliki pengaruh dan keterkaitan disebut sebagai *stakeholders* primer dan harus terlibat penuh dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan.

b. *Stakeholders* kunci

*Stakeholder* kunci merupakan pihak yang mempunyai kewenangan legal dalam proses pengambilan keputusan.

c. *Stakeholders* sekunder atau pendukung

*Stakeholders* pendukung merupakan *stakeholders* yang tidak mempunyai keterkaitan peran secara langsung terhadap rencana yang dibuat namun mempunyai kepedulian yang tergolong besar dalam proses pengembangan.

*Stakeholders* pendukung berperan sebagai fasilitator dalam proses pengembangan suatu kegiatan yang memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. *Stakeholders* pendukung meliputi para investor atau pihak swasta, LSM, dan peneliti.

Dapat disimpulkan bahwa kolaborasi *stakeholders* merupakan proses kerjasama yang melibatkan lebih dari dua *stakeholders* yang didalamnya terdapat pembagian peran sesuai dengan kemampuan setiap *stakeholders* untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

### **1.5.5 Pemberdayaan**

Sesuai konseptual menjelaskan tentang pemberdayaan atau kekuatan (*empowerment*) berasal dari kata '*power*' yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Gagasan utama pelaksanaan pemberdayaan berkaitan dengan konsep tentang kekuasaan. Kekuasaan sering dihubungkan dengan kemampuan yang dimiliki untuk membuat orang lain dapat bertindak sesuai yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Kekuasaan terbentuk dari relasi sosial, maka dari itu kekuasaan dan

hubungan kekuasaan bisa berubah. Pemahaman kekuasaan mengartikan pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan yang kemudian mempunyai konsep yang mempunyai makna atau bisa disebut kemungkinan berlangsungnya proses pemberdayaan sangat berhubungan kepada dua hal : Pertama, menjelaskan tentang otoritas bisa berubah, apabila otoritas tidak bisa berubah, pemberdayaan tidak akan terlaksana dengan cara apapun. Kedua, menjelaskan tentang otoritas bisa diperluas. Konsep ini menjelaskan tentang pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis (Suharto, 2005). Jim Ife mendeskripsikan konsep pemberdayaan sebagai dua konsep yang memiliki keterkaitan yang erat, dua konsep tersebut yaitu konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Menurut Ife, pemberdayaan bisa dideskripsikan melalui empat perspektif meliputi perspektif pluralis, perspektif elitis, strukturalis dan post-strukturalis (Zubaedi dalam Djamaludin 2017).

Pertama, pemberdayaan dilihat dari perspektif pluralis merupakan sebuah proses untuk membantu individu atau kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kekurangan dalam hidup supaya mereka mampu bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain. Maka dibutuhkan usaha untuk meningkatkan kapasitas masyarakat supaya mampu bersaing secara wajar. Kedua, pemberdayaan dilihat dari perspektif elitis adalah sebuah usaha untuk bergabung dan memberi pengaruh kepada kalangan elit seperti tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya dan lain-lain, membangun sebuah aliansi bersama kalangan elit,

melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elit. Upaya ini digunakan karena masyarakat menjadi tidak berdaya disebabkan adanya *power* dan *kontrol* yang kuat dari para elit terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi dan parlemen. Ketiga, pemberdayaan dilihat dari perpektif strukturalis yang merupakan sebuah agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuan pemberdayaan bisa wujudkan jika ketimpangan struktural dieliminasi. Secara umum masyarakat menjadi tidak berdaya disebabkan adanya suatu struktur sosial yang dominan lalu melakukan penindasan kepada mereka, dikarenakan alasan kelas sosial, gender maupun etnis. Pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah proses pembebasan, perubahan struktural secara fundamental serta berusaha menghilangkan penindasan struktural. Keempat, pemberdayaan dilihat dari perspektif post strukturalis yang merupakan sebuah pemberdayaan yang lebih menekankan pada aspek intelektualitas daripada aktivitas, aksi atau praksis. Berdasarkan perspektif ini maka pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai usaha untuk mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan berada pada aspek pendidikan.

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial (Zubaedi dalam Djamaludin 2017).

Berdasarkan konsep yang dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan proses membangun kemandirian masyarakat agar mampu meningkatkan kemampuannya dalam mengelola potensi yang ada disekitarnya.

Narayan dalam Djamaludin (2017) mencatat sedikitnya empat elemen kunci dari pemberdayaan yakni :

1. Akses informasi, informasi adalah kekuatan. Informasi timbal balik dari pemerintah terhadap masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat terhadap pemerintah memungkinkan pemerintah merespon kritik atau masukan dari masyarakat secara bertanggung jawab.
2. Partisipasi, partisipasi menjamin pengembangan sumberdaya dan pengetahuan lokal dan membawa komitmen terhadap perubahan, meskipun biasanya masukan dan partisipasi memerlukan perubahan aturan dan proses untuk menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berdebat soal isu partisipasi lokal dan prioritas pengaturan anggaran nasional, akses dasar dan pelayanan keuangan.
3. Akuntabilitas, pegawai negeri, pelayan publik, wiraswasta, pekerja dan politisi harus memegang laporan sebagai pertanggung jawaban pada kebijakan dan kerja mereka yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

4. Kemampuan pengorganisasian lokal dilakukan dengan menyerahkan pada kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasi mereka sendiri dan mobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah kepentingan umum

Teori tentang tahap pemberdayaan meliputi tiga tahap dalam proses pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang disampaikan oleh Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto dalam Fitri (2019) sebagai berikut :

1. Tahap Penyadaran,

Memberikan pemahaman terkait hak untuk menjadi mampu dan memotivasi mereka agar keluar dari kemiskinan, biasanya tahap ini dilakukan dengan pendampingan.

2. Tahap pengkapasitasan,

Membangun kemampuan masyarakat yang dinilai kurang mampu supaya mempunyai ketrampilan untuk mengambil peluang yang tersedia melalui pelatihan – pelatihan, serta kegiatan yang memiliki tujuan meningkatkan lifeskill.

3. Tahap Pendayaan,

Tahap dimana masyarakat diberi peluang sesuai kemampuan melalui keterlibatan aktif dan berkelanjutan dengan memberikan peran yang lebih banyak pada masyarakat sesuai kapasitas dan kapabilitas serta akomodasi aspirasi dan dipandu untuk melakukan evaluasi diri pada hasil pelaksanaan pilihan sebelumnya.

Indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penurunan jumlah penduduk miskin.
2. Meningkatkan penghasilan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia.
3. Partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di wilayahnya mengalami peningkatan.
4. Kemandirian kelompok meningkat dengan adanya perkembangan berbagai usaha produktif .
5. Kapasitas masyarakat meningkat begitu juga pemerataan pendapatan yang diukur dari adanya peningkatan pendapatan keluarga miskin.

#### **1.5.6 Desa Wisata**

Priasukmana & Mulyadin (2016) memberikan definisi mengenai Desa Wisata yakni sebuah kawasan pedesaan yang menawarkan daya tarik dari keseluruhan suasana di lingkungan desa untuk mencerminkan bahwa kawasan pedesaan memiliki nilai yang baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, juga kegiatan perekonomian yang memiliki daya tarik serta memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi tempat wisata.

Dapat disimpulkan bahwa desa wisata merupakan kawasan yang memiliki potensi wilayah baik asli maupun dikembangkan oleh masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa.

Kunci sukses pembangunan desa wisata yaitu :

1. Pembangunan Sumber daya manusia (SDM)

Pembangunan sumber daya manusia (SDM), dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan forum pertemuan untuk melakukan diskusi mengenai pengembangan kepariwisataan sesuai potensi yang dimiliki, selain itu juga bisa dilakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat mengenai cara menjadi pemandu wisata yang baik, cara memberikan pelayanan yang maksimal kepada wisatawan, juga pelatihan-pelatihan softskill seperti mengolah limbah menjadi kerajinan dan lain sebagainya.

2. Kemitraan

Merupakan kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan seperti kerjasama oleh pengelola wisata dengan swasta atau instansi yang terkait dengan bidang kepariwisataan untuk mengembangkan wisata lebih pesat.

3. Kegiatan pemerintahan di desa

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, seperti pembuatan peraturan desa tentang desa wisata, berkontribusi dalam pengelolaan potensi wisata, dan mendukung penuh terwujudnya desa wisata yang maju.

#### 4. Promosi

Promosi merupakan hal yang sangat penting, saat ini promosi tidak hanya bisa dilakukan dengan mendatangkan wartawan namun cukup dengan memanfaatkan sosial media maka proses promosi lebih efektif dan efisien karena tidak membutuhkan biaya yang besar seperti ketika harus mengundang wartawan.

#### 5. Festival/pertandingan

Setiap desa wisata memiliki keunikan masing-masing, tidak hanya dengan mengembangkan potensi wilayah desa namun juga bisa menggunakan kegiatan-kegiatan seperti pagelaran seni, kejuaraan olahraga atau kegiatan lainnya untuk meningkatkan daya tarik pengunjung wisata.

#### 6. Kerjasama dengan universitas

Universitas merupakan tempat untuk mendapatkan pengetahuan lebih mendalam mengenai bidang-bidang pengetahuan yang ada, untuk itu kerjasama dengan universitas juga penting misalnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun lokasi desa wisata sesuai masterplan atau lainnya, mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan sehingga perannya juga dibutuhkan dalam memajukan desa wisata.

### **1.5.7 Perilaku Organisasi**

Robbins and Judge ( dalam Jurnal Manajemen dan Organisasi Vol VIII, No 3, Desember 2017) memberikan pengertian terhadap perilaku organisasi sebagai suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak individu, kelompok, maupun struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud mengaplikasikan pengetahuan tersebut guna memperbaiki efektivitas organisasi. Sebagai suatu bidang studi, Perilaku Organisasi mempelajari tiga determinan dalam organisasi yaitu individu/ perorangan, kelompok, dan struktur.

Dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu dalam kelompok kaitannya untuk meningkatkan kinerja organisasi agar efektif dan efisien melalui karakteristik tertentu.

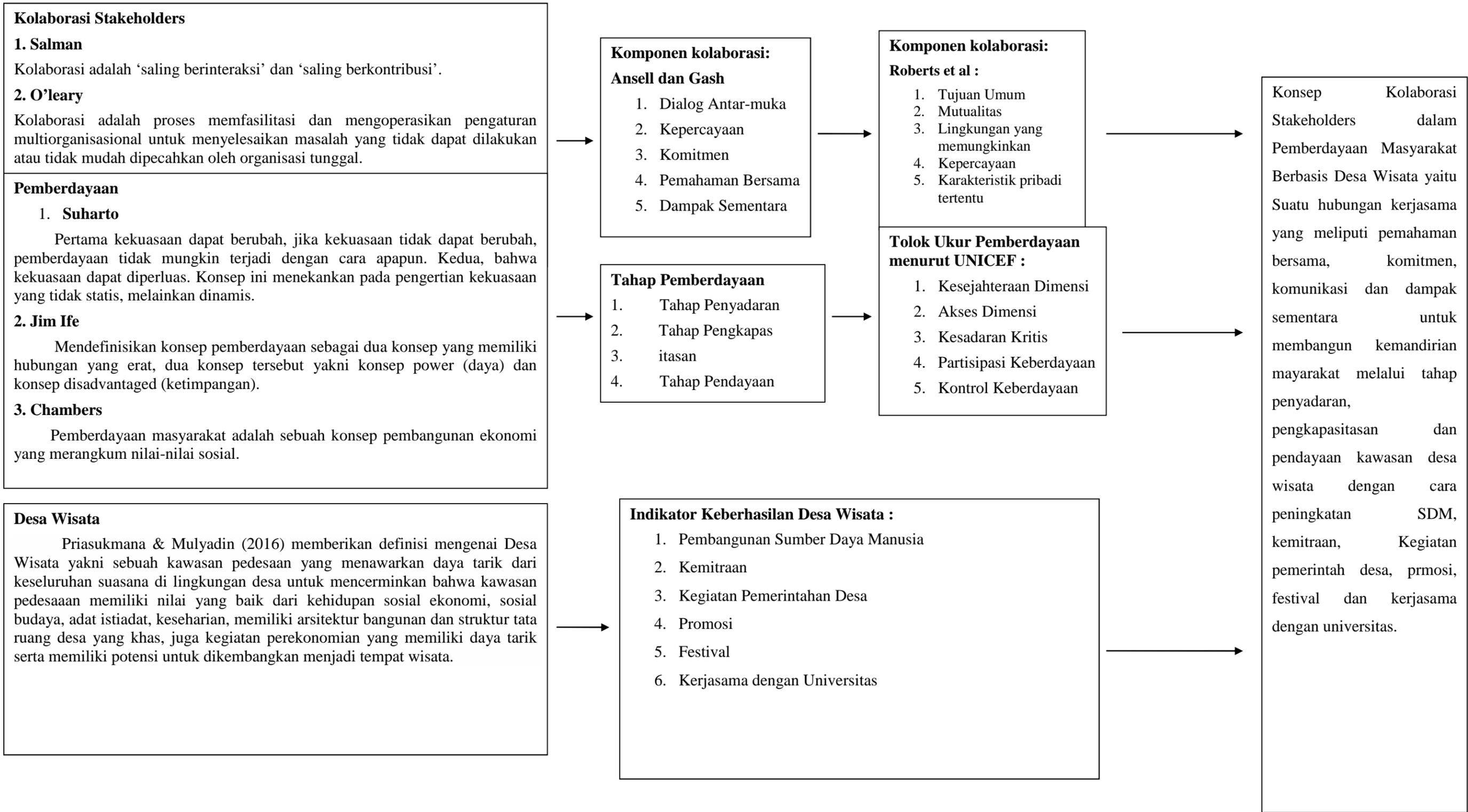
McShane and Glinow menyatakan bahwa dalam mempelajari perilaku organisasi perhatian dipusatkan pada tiga karakteristik yaitu : perilaku, struktur dan proses.

1. Karakteristik pertama dalam mempelajari perilaku organisasi adalah perilaku. Fokus dari perilaku keorganisasian adalah perilaku individu dalam organisasi. Untuk dapat memahami perilaku keorganisasian maka harus mampu memahami perilaku berbagai individu dalam organisasi. Tujuan pertama dari mempelajari perilaku keorganisasian adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian didalam

lingkungan organisasi. Memahami perilaku yang terjadi didalam organisasi saja belum cukup, karena harus meramalkan kejadian-kejadian tersebut.

2. Karakteristik yang kedua dalam mempelajari perilaku keorganisasian adalah struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi, bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu diatur dalam organisasi. Struktur organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku organisasi atau orang-orang dalam organisasi serta efektivitas dari organisasi tersebut.
3. Proses Karakteristik yang ketiga dari perilaku keorganisasian adalah proses organisasi. Proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi antara lain meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan dan kekuasaan. Salah satu pertimbangan utama dalam merancang struktur organisasi yang efektif adalah agar berbagai proses tersebut dapat dilakukan dengan efisien dan efektif.





## 1.6 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.7  
Operasionalisasi Konsep

Konsep	Fenomena
<p>Suatu hubungan kerjasama yang meliputi pemahaman bersama, komitmen, komunikasi dan lingkungan kolaborasi untuk membangun kemandirian masyarakat melalui tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan kawasan desa wisata yang terdiri dari aksesibilitas, daya tarik, dukungan, sumber daya manusia memadai, dan tersedianya akomodasi serta keamanan.</p>	<p>1. Pemahaman bersama merupakan penyelarasan pemikiran dan penyatuan tujuan para <i>stakeholder</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya pemahaman kondisi awal untuk membentuk kesamaan tujuan antara pihak internal Pantai Karang Jahe yaitu BUMDes dan Unit Pengelola dalam tahap penyadaran kepada masyarakat dengan melibatkan Kelompok Sadar Wisata dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.</li> <li>b. Kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam tahap pengkapasitasan berupa pembinaan, sosialisasi, pelatihan dan koordinasi untuk membangun kemandirian masyarakat dan bisa diimplementasikan agar mampu meningkatkan desa wisata diberbagai aspek mulai dari akomodasi, aksesibilitas, , sumber daya manusia yang baik kemampuannya, serta daya tarik wisatawan.</li> </ol> <p>2. Komitmen merupakan komponen yang sangat penting dalam keberlanjutan kolaborasi sebagai perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konsistensi <i>stakeholders</i> dari pihak internal maupun instansi terkait dalam menjalankan peran dan tanggung jawab pada tahap pengkapasitasan untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam</li> </ol>

Konsep	Fenomena
	<p>mengembangkan desa wisata untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.</p> <p>b. Memiliki kepercayaan antar <i>stakeholder</i> dalam melakukan tugas dan perannya masing-masing pada tahap pengkapasitasan <i>stakeholders</i> BP KJB, Pemerintah Desa, dinas terkait, swasta dan Masyarakat khususnya dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia di desa wisata untuk meminimalkan kendala dalam pemberdayaan yang dilakukan.</p> <p>3. Komunikasi berkaitan dengan tingkat intensitas komunikasi yang dilakukan antar <i>stakeholders</i>, komunikasi berkaitan dengan pembagian informasi dengan intensitas tertentu antara Pemerintah, BP KJB, dinas, serta swasta dalam tahap pendayaan terkait perkembangan maupun kendalanya sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa wisata.</p> <p>4. Dampak Sementara berkaitan dengan keberhasilan yang diraih dari kolaborasi, keberhasilan ini bersifat temporal karena akan muncul keberhasilan-keberhasilan lain kedepannya.</p>

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti, 2020

## 1.7 Argumen Penelitian

Kolaborasi *stakeholders* merupakan salah satu kunci sukses pembangunan desa wisata karena dengan adanya kolaborasi maka proses pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah desa mampu berjalan secara efektif dan efisien karena kolaborasi melibatkan lebih dari dua *stakeholders* sehingga pencapaian tujuan lebih mudah, namun kenyataannya proses kolaborasi tida di Pantai Karang Jahe Desa Punjulharjo belum berjalan

lancar sesuai yang di rencanakan karena terdapat beberapa kendala yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil kolaborasi ini.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Desain Penelitian**

Penulis didalam penelitian ini menggunakan *design* penelitian berupa metode penelitian kualitatif dimana penulis mengamati secara langsung maupun tidak langsung terkait proses terbentuknya kolaborasi *stakeholders* dalam pemberdayaan berbasis desa wisata di Pantai Karang Jahe Desa Punjulharjo Rembang. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk memahami permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan kolaborasi *stakeholders*.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian merupakan lokasi atau letak dimana penelitian akan dilakukan. Lokus yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pantai Karang Jahe Desa Punjulharjo Rembang. Lokasi penelitian yang ditetapkan ditujukan untuk memberi batas ruang lingkup penelitian dan berfokus terhadap fenomena yang sedang terjadi.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Informan yang dipilih untuk penelitian ini yaitu seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi yang meliputi BP KJB (Badan Pengelola Karang Jahe Beach), BUMDes Punjulharjo, Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata, Kelompok Sadar Wisata, Karang Taruna dan Warga Desa Punjulharjo.

#### **1.8.4 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang meliputi letak geografis obyek, data profil masing-masing *stakeholders* yang terlibat, proses terbentuknya kolaborasi, proses kolaborasi dalam pemberdayaan di Desa Punjulharjo, keberhasilan kolaborasi dalam pemberdayaan yang dilakukan serta faktor penghambat dan pendorong dalam berlangsungnya proses kolaborasi.

#### **1.8.5. Sumber Data**

##### 1. Data Primer

Sumber dari data primer ini adalah wawancara langsung dengan informan yang berasal dari BP KJB (Badan Pengelola Karang Jahe Beach), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BUMDes Punjulharjo, dan Kelompok Sadar Wisata.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder tersebut terdiri dari :

- 1) Dokumen, arsip-arsip dan laporan kegiatan resmi yang ada di Dinas maupun pemerintah desa yang terlibat dalam kolaborasi di Desa Punjulharjo.
- 2) Artikel dan informasi dari jurnal dan internet.

- 3) Peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pariwisata di Rembang dan peraturan desa tentang desa wisata Punjulharjo.

### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu:

1. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan kepada BP KJB (Badan Pengelola Karang Jahe Beach) selaku pengelola Pantai Karang Jahe, Dinas Kebudayaan Pariwisata sebagai fasilitator utama kolaborasi *stakeholders* Desa Punjulharjo, BUMDes Punjulharjo yang bertugas memberdayakan perekonomian masyarakat, dan Kelompok Sadar Wisata untuk memberikan kesadaran wisata untuk masyarakat.

Penelitian ini juga menggunakan dokumentasi berupa foto bersama informan ketika melaksanakan pengumpulan data maupun ketika melakukan observasi Pantai Karang Jahe Desa Punjulharjo Rembang.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap proses kolaborasi *stakeholders* dalam pemberdayaan di Desa Punjulharjo seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan lain yang memungkinkan pengambilan data terjadi.

3. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur-literatur berupa dokumen, arsip-arsip dan laporan kegiatan resmi yang ada di Dinas maupun pemerintah desa yang terlibat dalam kolaborasi di Desa Punjulharjo serta artikel dan informasi dari jurnal.

Pengumpulan data diproses dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposivesampling* dalam Sugiyono (2016:218-219) merupakan teknik penentuan sampel yang digunakan untuk menentukan narasumber berdasarkan tujuan dan pertimbangan bahwa narasumber yang dipilih adalah yang paling memahami tentang masalah yang akan diteliti, sehingga memberi kemudahan kepada peneliti.

#### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

1. Pengumpulan data merupakan merupakan suatu proses yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan;
2. Reduksi data dilakukan ketika proses pengumpulan data dimulai dengan cara membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan sebagainya dengan tujuan menyeleksi data atau informasi yang tidak sesuai dengan apa yang diteliti. Misalnya dengan membuat catatan wawancara. Catatan wawancara kemudian dikumpulkan sampai mencukupi, setelah itu catatan dipilih kembali untuk menentukan catatan yang dianggap paling

berhubungan dan menyeleksi data yang tidak digunakan, kemudian dimunculkan dalam bentuk display data.

3. Uji keabsahan adalah proses pengujian kebenaran atau keabsahan dengan uji kredibilitas data. Pengujian data dilakukan menggunakan teknik triangulasi.
4. Penyajian data merupakan data yang disajikan dalam bentuk uraian singkat seperti tabel, grafik, diagram dan sejenisnya sehingga memberi kemudahan dalam memahami fenomena yang terjadi serta menyusun rencana kerja selanjutnya berdasarkan fenomena yang sudah terjadi.
5. Penarikan kesimpulan yang dilakukan bersifat *temporal*, data yang didapat dan telah dianalisis, kemudian dijelaskan dan diartikan dalam bentuk kata-kata guna mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan keterangan tersebut maka setiap tahap dalam proses dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan mempelajari keseluruhan data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumentasi melalui metode wawancara.

#### **1.8.8 Kualitas Data**

William Wiersma dalam Sugiyono (2016:372-374), mendefinisikan triangulasi sebagai proses pengecekan data yang berasal dari berbagai sumber, cara dan waktu sehingga terdapat tiga cara dalam proses

triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu, yang kemudian dijelaskan sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber yaitu uji validitas melalui cek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda.
2. Triangulasi teknik yaitu uji kredibilitas melalui cek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, bisa menggunakan wawancara, yang kemudian dilanjutkan dicek dengan studi kepustakaan, dokumentasi, dan observasi.
3. Triangulasi waktu yaitu uji data menggunakan sumber yang sama di waktu yang berbeda.

Pengujian validitas data di penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Sumber informasi bukan hanya didapatkan melalui satu informan saja, melainkan melalui wawancara lain dengan informan berbeda dan waktu yang berbeda demi mendapat informasi yang valid sesuai fakta dilapangan. Selain itu, peneliti melakukan validitas data dengan mmelakukan analisis data hasil wawancara menyesuaikan observasi dilapangan, dokumentasi dan studi kepustakaan.